

ABSTRAK

KEDUDUKAN GAMBAR UKUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Winarno

Sengketa batas/letak tanah banyak terjadi di masyarakat yang di sebabkan oleh kurangnya pengawasan pemilik tanah dan beberapa faktor lain sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah. Dalam pendaftaran tanah salah satunya dengan kegiatan pengukuran untuk memperoleh kepastian hukum fisik bidang tanah. Dalam menyelesaikan sengketa batas/letak bidang tanah salah satunya dengan melakukan pengembalian batas dengan menggunakan Gambar Ukur.

Pendekatan masalah dilakukan dengan metode pendekatan normatif-empiris yaitu mengidentifikasi implementasi ketentuan hukum positif pada suatu peristiwa hukum tertentu. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan diolah dengan cara memeriksa data, klasifikasi data, dan sistematika data, selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Gambar Ukur sebagai salah satu alat untuk penyelesaian sengketa batas dengan cara pengembalian batas. Gambar Ukur menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara sengketa batas. Dalam rangka mencegah dan mempercepat menyelesaikan sengketa pertanahan serta memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah, BPN dalam penyelesaian sengketa berperan sebagai mediator dengan prinsip *alternative dispute resolution/ADR*, dan seiring dengan perkembangan teknologi untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah, BPN RI telah mengembangkan aplikasi Geo KKP yang bertujuan agar setiap bidang tanah yang telah bernomor hak/sertipikat dapat langsung diketahui letak bidang tanahnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar setiap batas bidang tanah dipasang tanda batas/patok secara permanen dan tanahnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi sengketa batas dikemudian hari, serta penanganan sengketa pertanahan yang telah diatur sedemikian rupa didukung dengan kemajuan teknologi dan untuk mendukung aktifnya aplikasi Geo KKP diperlukan SDM yang handal pada setiap kantor pertanahan serta jaringan internet yang memadai dan adanya alternatif ketika terjadi pemadaman listrik ketika jam kerja sehingga tidak mengganggu kinerja aplikasi tersebut.